

## Implementasi Tata Tertib Sekolah sebagai Upaya Preventif Kenakalan Remaja: Studi Kasus di MTs Normal Islam Samarinda

<sup>1</sup>Kukuh Ichsanulkarim, <sup>2</sup>Ismail

<sup>1,2</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

[kukuh.ichsanulkarim@gmail.com](mailto:kukuh.ichsanulkarim@gmail.com), [ismailborneo97@gmail.com](mailto:ismailborneo97@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata tertib sekolah dalam membentuk kedisiplinan dan mencegah kenakalan remaja di MTs Normal Islam Samarinda. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui pengumpulan data berupa observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada kepala madrasah, guru bimbingan konseling (BK), wali kelas, serta perwakilan siswa kelas 7, 8, dan 9 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara aturan tertulis dan pemahaman substantif siswa, sehingga kepatuhan siswa masih bersifat mekanis karena didorong oleh rasa takut terhadap sanksi. Selain itu, penegakan disiplin yang cenderung reaktif dan adanya inkonsistensi perlakuan antar guru menimbulkan ruang abu-abu yang melemahkan kewibawaan aturan. Namun, keterlibatan wali kelas dan guru BK melalui pendekatan dialogis terbukti menjadi strategi adaptif yang efektif. Kesimpulannya, tata tertib sekolah perlu direorientasikan dari sekadar instrumen punitif menjadi instrumen pendidikan yang dialogis agar nilai-nilai karakter dapat diinternalisasi secara lebih substantif oleh siswa.

**Kata Kunci:** Tata tertib sekolah, Kedisiplinan, Kenakalan remaja, Internalisasi nilai, Madrasah.

### *Abstract*

*This study aims to analyze the effectiveness of school regulations in shaping discipline and preventing juvenile delinquency at MTs Normal Islam Samarinda. The method used is a qualitative case study approach, with data collected through direct observation, documentation, and in-depth interviews with the head of the madrasah, guidance and counseling teachers, homeroom teachers, and student representatives from grades 7, 8, and 9 selected using purposive sampling. Data validity was tested through source triangulation, while data analysis used the Miles and Huberman model. The results show a gap between written regulations and students' substantive understanding, causing student compliance to remain mechanical because it is driven by fear of sanctions. In addition, discipline enforcement tends to be reactive, and inconsistent treatment among teachers creates a "gray area" that weakens the authority of the rules. However, the involvement of homeroom teachers and guidance and counseling teachers through a dialogical approach has proven to be an effective adaptive strategy. In conclusion, school regulations need to be reoriented from merely punitive instruments into dialogical educational instruments so that character values can be internalized more substantively by students.*

**Keywords:** *School regulations, Discipline, Juvenile delinquency, Value internalization, Madrasah.*

### Pendahuluan

Pendidikan di tingkat sekolah menengah merupakan fondasi utama dalam pembentukan moralitas dan karakter peserta didik (Nurmaliyani et al., 2024). Usia remaja pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs)

merupakan fase transisi kritis dari masa anak-anak menuju dewasa yang ditandai oleh gejala emosi serta pencarian identitas diri (Suwanto et al., 2026). Ketidakstabilan psikologis pada fase perkembangan ini sering kali membuat remaja rentan terhadap pengaruh negatif kelompok

sebayu, yang memicu perilaku menyimpang atau kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Fenomena seperti perundungan, membolos, dan ketidakpatuhan terhadap atribut sekolah menjadi tantangan nyata institusi pendidikan dalam menjaga kondusifitas ekosistem belajar (Rahmadi Ali et al., 2025). Guna mengantisipasi perluasan dampak tersebut, madrasah memegang peran krusial sebagai agen kontrol sosial melalui penerapan tata tertib secara konsisten.

Secara teoretis, tata tertib bukan sekadar instrumen hukuman, melainkan sarana institusional untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral ke dalam sanubari siswa (Durkheim, 1961). Namun, dalam realitas sosiologi pendidikan, terdapat celah lebar antara regulasi tertulis dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Penegakan disiplin yang terlalu represif berisiko memicu resistensi ego remaja, sedangkan aturan yang terlalu longgar justru menyuburkan normalisasi pelanggaran di lingkungan sekolah.

Mayoritas penelitian terdahulu mengenai tata tertib masih bertumpu pada pendekatan kuantitatif yang menguji korelasi linear antara sanksi dan tingkat kepatuhan. Masih sedikit penelitian kualitatif yang membedah proses pembentukan kesadaran nilai di lingkungan madrasah, khususnya terkait dinamika disparitas pemahaman siswa antarjenjang kelas dan inkonsistensi diskresi guru saat menghadapi pelanggaran. Celah kosong (*gap analysis*) inilah yang menjadi ruang masuk bagi penelitian ini.

MTs Normal Islam Samarinda memiliki urgensi besar untuk memastikan bahwa tata tertibnya berfungsi secara proaktif-preventif, bukan sekadar administratif-punitif yang reaktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi tata tertib sekolah dalam membentuk kedisiplinan siswa kelas 7, 8, dan 9 di MTs Normal Islam Samarinda serta perannya sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja.

## Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Desain ini dipilih untuk mendalami secara komprehensif dan kontekstual mengenai dinamika implementasi tata tertib sekolah sebagai instrumen preventif kenakalan remaja

dalam realitas ruang lingkup madrasah (Moleong, 2018).

1. Lokasi dan Subjek Penelitian Penelitian dilakukan di MTs Normal Islam Samarinda. Pemilihan subjek dan informan penelitian dilakukan secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang kaya dan relevan dengan fokus masalah (Sanjaya & Pratama, 2020). Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yang terdiri dari:

- 1 orang Kepala Madrasah selaku penentu kebijakan regulasi kesiswaan.
- 1 orang Guru Bimbingan dan Konseling (BK) selaku pemegang otoritas intervensi perilaku siswa.
- 3 orang Wali Kelas (masing-masing mewakili jenjang kelas 7, 8, dan 9) selaku pelaksana penegakan disiplin harian.
- 3 orang perwakilan siswa (1 siswa dari kelas 7, 1 siswa dari kelas 8, dan 1 siswa dari kelas 9) yang dipilih berdasarkan rekomendasi guru BK terkait riwayat dinamika perilaku mereka di sekolah.

2. Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi untuk menjaga kedalaman informasi (Moleong, 2018):

- Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur guna menggali persepsi informan mengenai efektivitas tata tertib, hambatan penegakan aturan, serta strategi kolaboratif guru. Wawancara dilakukan secara personal di ruang kerja guru dan ruang BK untuk menjaga kenyamanan psikologis informan.
- Observasi Terstruktur: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku siswa pada waktu-waktu krusial, seperti jam masuk sekolah, pergantian jam pelajaran, waktu istirahat, dan jam kepulangan, serta mengamati konsistensi respon guru saat menjumpai pelanggaran kasatmata.
- Studi Dokumentasi: Dilakukan melalui analisis isi terhadap dokumen tata tertib resmi MTs Normal Islam Samarinda, buku rekam jejak poin pelanggaran siswa periode dua semester terakhir, serta dokumen kurikulum madrasah.

3. Analisis Data dan Keabsahan Data Proses analisis data berjalan secara interaktif sejak pengumpulan data di lapangan dengan mengadopsi model Miles dan Huberman (Fadli,

2021). Langkah analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu menyeleksi, menyederhanakan, dan mengodekan transkrip wawancara serta catatan lapangan yang berkaitan dengan konsep kepatuhan mekanis dan diskresi guru; (2) penyajian data (*data display*) berupa narasi teks analitis dan tabel pemetaan kategori pelanggaran; dan (3) penarikan serta pengujian kesimpulan.

Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber (membandingkan data hasil wawancara antara kepala madrasah, guru, dan siswa) serta triangulasi teknik (menyilangkan data hasil wawancara mendalam dengan temuan dari observasi lapangan dan studi dokumen administratif) (Moleong, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

1. Kesenjangan Formalitas Aturan dan Pemahaman Substantif Siswa, Hasil penelitian di MTs Normal Islam Samarinda menunjukkan dokumen tata tertib telah disusun secara komprehensif untuk mengatur perilaku siswa. Namun, terdapat dikotomi mencolok antara formalitas regulasi tertulis tersebut dengan pemahaman substantif yang dimiliki siswa, khususnya di kelas 7 dan 8. Aturan cenderung dipersepsikan sebatas batasan birokratis eksternal, bukan sebagai nilai-nilai moral yang harus diinternalisasikan dalam kesadaran diri (*self-awareness*). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak wali kelas, kepatuhan harian siswa baru menyentuh level formalitas superfisial; siswa cenderung patuh hanya karena didorong oleh ketakutan terhadap akumulasi poin sanksi akademik, bukan karena kesadaran moral pribadi akan pentingnya ketertiban.

Temuan tersebut divalidasi oleh pengakuan para siswa jenjang awal yang menyatakan bahwa fokus utama mereka di sekolah adalah memodifikasi perilaku secara artifisial demi menghindari hukuman kesiswaan, tanpa memahami urgensi substantif dari aturan yang diterapkan. Data observasi lapangan mengonfirmasi fenomena "kepatuhan mekanis" ini; siswa secara reaktif merapikan atribut seragam atau menghentikan pelanggaran minor hanya ketika mereka mendeteksi kehadiran fisik guru piket atau kepala madrasah di koridor kelas, dan mereka cenderung kembali melanggar saat pengawasan tersebut melonggar.

Secara teoretis, kegagalan internalisasi nilai ini disebabkan oleh metode sosialisasi tata tertib madrasah yang masih bersifat satu arah dan instruktif tanpa ruang dialog. Dalam kacamata psikologi perkembangan, remaja awal berada pada fase kritis yang sedang mengalami restrukturisasi otonomi diri dan penajaman pemikiran kritis (Santrock, 2019). Jika regulasi sekolah diposisikan sebagai daftar larangan kaku yang doktriner, ego remaja akan mempersepsikannya sebagai pengekangan otonomi yang justru memicu resistensi semu dan kepatuhan artifisial.

Manajemen kesiswaan di madrasah seharusnya mampu menjembatani aturan normatif menjadi sebuah kesadaran afektif yang mendalam. Kepatuhan yang murni berbasis pada pengawasan fisik dan ketakutan sanksi sangat rapuh serta kehilangan daya ikatnya begitu siswa berada di luar ekosistem sekolah (Nurmaliyani et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan reposisi pendekatan agar tata tertib dipahami siswa sebagai instrumen perlindungan moral, bukan sekadar alat pembatasan ruang gerak remaja.

2. Pola Penegakan Disiplin Reaktif dan Ruang Diskresi Guru Dinamika penegakan disiplin di MTs Normal Islam Samarinda cenderung terjebak pada pola reaktif-punitif, di mana konsekuensi aturan umumnya baru bergerak masif setelah tindakan kenakalan remaja termaterialisasi secara nyata. Selain itu, fluiditas penegakan aturan sangat dipengaruhi oleh ruang diskresi guru harian yang memunculkan inkonsistensi perlakuan antarjenjang kelas. Berdasarkan penjelasan dari pihak wali kelas senior, guru-guru cenderung memberikan toleransi longgar berupa nasihat lisan di tempat bagi siswa kelas 9 yang melakukan pelanggaran minor demi menjaga stabilitas psikologis mereka menjelang ujian kelulusan. Sebaliknya, tindakan tegas berupa eksekusi sanksi fisik ringan dan pencatatan poin langsung diterapkan secara ketat kepada siswa kelas 7 sebagai bentuk terapi kejutan (*shock therapy*).

Disparitas penegakan ini diperkuat oleh data buku rekam jejak kesiswaan, di mana pelanggaran minor siswa kelas 8 dan 9 jarang terdokumentasikan secara formal karena diselesaikan lewat diskresi personal guru yang mengajar. Inkonsistensi akibat penerapan diskresi yang bias dan situasional ini dalam jangka panjang berpotensi merusak iklim moral

serta wibawa kelembagaan madrasah di mata siswa.

Penegakan disiplin yang terlalu longgar di satu sisi namun represif di sisi lain, serta terjebak pada pendekatan kaku tanpa dasar keadilan yang setara, justru memicu resistensi ego dan apatisisme di kalangan siswa (Sembiring, 2025). Siswa tidak belajar menghargai esensi keadilan di balik sebuah regulasi, melainkan belajar membaca celah kepribadian guru harian yang bisa dinegosiasi demi meloloskan diri dari sanksi.

Lebih jauh lagi, pengawasan yang tidak seragam atas nama diskresi personal ini dapat menstimulasi terjadinya normalisasi pelanggaran di kalangan pelajar (Hud, 2025). Ketika siswa melihat pelanggaran tertentu dilegalkan melalui pembiaran guru, nilai mengikat dari tata tertib tersebut perlahan akan luntur. Tata tertib pun kehilangan fungsi preventifnya karena taring aturan di lapangan menjadi sangat subjektif, bergantung pada siapa figur guru yang sedang berjaga dan jenjang kelas siswa yang melanggar.

3. Sinergitas Preventif antara Guru Bimbingan Konseling dan Wali Kelas Poin terakhir dalam pembahasan ini menyoroti pola koordinasi dan sinergitas antar-aktor sekolah dalam mereduksi potensi kenakalan remaja harian. Hasil riset mengungkap bahwa penanganan kedisiplinan di madrasah ini belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dan proaktif. Pihak wali kelas cenderung menempatkan ruang Bimbingan dan Konseling (BK) sebatas "lembaga peradilan" atau tempat pembuangan terakhir untuk melimpahkan siswa-siswa yang dinilai sudah tidak bisa diatur di dalam kelas, alih-alih menjadikannya mitra konsultasi preventif sejak dini. Gejala ini menunjukkan bahwa pembagian kerja dalam manajemen kesiswaan masih terfragmentasi oleh sekat-sekat birokratis sekolah yang kaku.

Informasi dari guru BK dan jajaran wali kelas mengonfirmasi bahwa pola komunikasi yang terbangun selama ini masih bersifat insidental—baru terjadi secara reaktif ketika ada kasus pelanggaran berat siswa yang mencuat ke permukaan. Madrasah masih kekurangan ruang diskusi berkala antar-guru untuk memetakan potensi kerentanan perilaku siswa secara berkelompok.

Secara konseptual, penanggulangan kenakalan remaja di lingkungan institusi pendidikan memerlukan pendekatan kontrol sosial sekunder yang kolaboratif, terencana,

dan berkesinambungan. Kontrol sosial sekunder yang efektif tidak dapat bertumpu pada satu otoritas tunggal kesiswaan, melainkan harus melibatkan sistem pengawasan melekat yang terpadu di setiap lini sekolah (Moleong, 2018). Ketika wali kelas dan guru BK mampu membangun sinergitas proaktif, deteksi dini terhadap potensi penyimpangan perilaku remaja dapat dilakukan melalui pendekatan konseling yang humanis dan persuasif (Prasetyo, 2021).

Pola kemitraan yang solid ini akan mengubah wajah tata tertib dari instrumen penghukum yang ditakuti menjadi sistem pendukung (*supporting system*) yang membimbing pertumbuhan moralitas remaja. Melalui kerja sama yang integratif, penegakan aturan tidak lagi membebani satu pihak, melainkan menjelma menjadi gerakan kolektif untuk menciptakan ekosistem madrasah yang aman, tertib, dan kondusif bagi perkembangan psikologis siswa.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata tertib sekolah di MTs Normal Islam Samarinda belum sepenuhnya berhasil bertransformasi dari instrumen administratif-punitif menjadi instrumen proaktif-preventif dalam menanggulangi kenakalan remaja. Terdapat tiga temuan krusial yang saling berkelindan di lapangan.

*Pertama*, ditemukan kesenjangan yang mencolok antara formalitas regulasi tertulis dengan pemahaman substantif siswa. Kepatuhan yang ditunjukkan oleh siswa kelas 7, 8, dan 9 masih berada pada level kepatuhan mekanis artifisial, di mana motivasi utama siswa mematuhi aturan adalah demi menghindari sanksi poin kesiswaan, bukan didasari oleh internalisasi kesadaran moral yang otonom (Durkheim, 1961).

*Kedua*, pola penegakan disiplin harian masih bersifat reaktif dan bias, di mana pemanfaatan ruang diskresi guru yang tidak terstandarisasi memicu terjadinya inkonsistensi sanksi dan disparitas perlakuan antarjenjang kelas. Longgarnya pengawasan akibat subjektivitas ini dalam jangka panjang berisiko menstimulasi normalisasi pelanggaran minor di lingkungan madrasah.

*Ketiga*, manajemen preventif sekolah belum berjalan secara optimal akibat kurangnya sinergitas sistemik antara Guru Bimbingan

Konseling (BK) dan Wali Kelas. Pola koordinasi yang terbangun masih bersifat insidental dan tersekat oleh birokrasi kaku, sehingga ruang BK sering kali salah diposisikan sebagai lembaga penghukum daripada mitra konsultasi psikologis harian siswa.

Secara teoretis, kepatuhan yang murni bersandar pada pengawasan fisik sangatlah rapuh (Nurmaliyani et al., 2024). Menghadapi fase transisi remaja awal yang fluktuatif, madrasah wajib mereposisi fungsi tata tertib dari daftar larangan yang kaku menjadi sistem pendukung (*supporting system*) tumbuh kembang moralitas siswa (Suwanto et al., 2026). Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi manajemen kesiswaan di MTs Normal Islam Samarinda melalui standarisasi batas diskresi guru, pembukaan ruang dialog dua arah dengan siswa, serta penguatan kemitraan kolaboratif yang terpadu antara wali kelas dan guru BK guna mendeteksi serta mereduksi gejala kenakalan remaja sejak dini.

#### Daftar Pustaka

- Banur, A. (2026). Dinamika kenakalan remaja awal di lingkungan sekolah menengah. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Islam*, 12(1), 45–58.
- Durkheim, É. (1961). *Moral education: A study in the theory and application of the sociology of education*. The Free Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hud, M. (2025). Dampak pembiaran pelanggaran minor terhadap habituasi kedisiplinan siswa di madrasah. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Nusantara*, 9(2), 112–126.
- Lestari, P. (2023). Analisis kualitatif kesadaran nilai moral siswa berbasis tata tertib sekolah. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 8(2), 89–101.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. rev.). PT Remaja Rosdakarya.
- Novi Rahma, S. (2024). Fenomena perundangan dan ketidakpatuhan atribut seragam di tingkat sekolah menengah pertama. *Jurnal Konseling Lingkar Akademik*, 6(3), 201–215.
- Nurmaliyani, V., Saputra, A., & Handayani, T. (2024). Manajemen aturan kesiswaan berorientasi karakter: Studi efektivitas lingkungan belajar jangka panjang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 12(1), 14–27.
- Prasetyo, B. (2021). Peran sekolah sebagai agen kontrol sosial sekunder dalam mereduksi kenakalan remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan*, 15(2), 77–88.
- Rahmadi Ali, M., Fauzi, I., & Kurniawan, H. (2025). Internalisasi disiplin berbasis nilai moral keagamaan di lingkungan madrasah tsanawiyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 10(1), 33–49.
- Sanjaya, W., & Pratama, R. (2020). Penerapan purposive sampling dalam penelitian kualitatif bidang manajemen pendidikan. *Jurnal Metodologi Riset Akademik*, 4(2), 102–116.
- Santrock, J. W. (2019). *Adolescence* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sembiring, R. (2025). Resistensi ego remaja terhadap penegakan disiplin kaku: Analisis sosiologi pendidikan. *Jurnal Dinamika Sosial Remaja*, 7(2), 150–164.
- Suwanto, E., Wijaya, C., & Hidayat, R. (2026). Karakteristik psikologis remaja awal dan rekonstruksi identitas diri di sekolah berbasis agama. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 14(1), 59–74.
- Wahyudi, G., & Saputra, D. (2022). Inkonsistensi diskresi guru harian dan dampaknya terhadap disparitas pemahaman tata tertib siswa. *Jurnal Evaluasi dan Manajemen Pendidikan*, 11(3), 210–223.